



DINAS PERTANIAN



TA 2025

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH



Jalan Sunan Ampel No. 2



Situs Web Kami
<http://distan.cirebonkab.go.id>



KATA PENGANTAR

Dinas Pertanian dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk teknis tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memuat pencapaian dalam pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Tahun 2024. Laporan ini disusun untuk melihat keberhasilan, serta upaya apa saja yang telah dilakukan Dinas Pertanian sebagai sarana dalam melakukan penilaian kinerja untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tahun yang akan datang.

Sumber, Februari 2026

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Cirebon *g*



Dr. H. Deni Nurcahya, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19711021 200501 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pertanian memiliki 1 sasaran strategis, sedangkan urusannya ada dua yaitu : (1) Urusan Pertanian yang memiliki 4 (enam) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan; dan (2) Non urusan Pertanian memiliki 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Anggaran yang dimiliki sebesar Rp 59.341.443.152 dengan realisasi sejumlah Rp 53.450.981.589 atau 90,07%. Sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sejumlah Rp 5.890.461.563.

Adanya efisiensi sebesar Rp 5.890.461.563 bersumber dari :

- a) Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Rp 3.579.997.524)
- b) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (Rp 1.973.282.409)
- c) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (Rp 252.096.203)
- d) Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Rp 48.351.977)
- e) Program penyuluhan pertanian (Rp 36.733.450)

Capaian kinerja di Tahun 2025 pada komoditas padi terealisasi (695.991 ton) lebih rendah dari target RPD (708.140 ton) hanya mencapai 98,28%. Sedangkan pada komoditas mangga terealisasi (37.923 ton) lebih rendah dari target RPD yang mencapai (40.780 ton) atau sebesar 92,99%. Dan pada populasi domba terealisasi (310.500 ekor) lebih rendah dari target RPD yang mencapai (311.418 ekor) atau sebesar 99,71%. Pada sasaran nilai LKIP Dinas pertanian terealisasi 73,90 poin lebih tinggi dari target yang ditetapkan sejumlah 72 poin.

Dinas Pertanian dalam memenuhi target sasaran yang telah ditetapkan RPD Tahun 2025-2026 memiliki faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat. **Faktor pendukung** keberhasilan diantaranya yaitu : (1) Ketersediaan anggaran; dan (2) Ketersediaan SDM yang cukup. Sementara **Faktor penghambatnya** di Tahun 2025 terjadi kemarau basah sehingga pada komoditas mangga tidak dapat menghasilkan produksi yang optimal karena bunga-bunganya pada rontok menyebabkan penurunan produksi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pohon Kinerja, <i>Cascading</i> Kinerja, <i>Crosscutting</i> Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	2
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	9
1.3 Isu-Isu Strategis.....	12
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	13
1.5 Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2023/4.	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	19
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	19
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	21
2.3 Struktur Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025...	21
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	25
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	30
3.2 Capaian Kinerja Lainnya.....	32
3.3 Efisiensi Anggaran.....	34
3.4 Inovasi.....	39
3.5 Lintas Sektor.....	42
BAB IV PENUTUP.....	43
4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Langkah Perbaikan Kinerja.....	43
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1	Peta jabatan.....	9
1.2	Isu strategis, tujuan dan sasaran yang ada di Kabupaten Cirebon.....	13
1.3	Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi jabatan dan jenis kelamin Tahun 2025.....	14
1.4	Distribusi jenjang pendidikan PNS di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.....	15
1.5	Distribusi jenjang pendidikan PPPK non penyuluh pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.....	16
1.6	Distribusi jenjang pendidikan PPPK penyuluh pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.....	16
1.7	Distribusi jenjang pendidikan PPPK paruh waktu pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.....	16
1.8	Distribusi PNS menurut pangkat/golongan.....	16
1.9	Distribusi PPPK non penyuluh menurut pangkat/golongan.....	17
1.10	Distribusi PPPK penyuluh menurut pangkat/golongan.....	17
1.11	Sarana dan Prasarana di Dinas Pertanian.....	17
1.12	Keuangan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2025.....	18
1.13	Tindak lanjut laporan kinerja instansi Pemerintah Tahun 2024	18
2.1.	Sasaran dan indikator kinerja sasaran Dinas Pertanian.....	20
2.2.	Target sasaran di Rencana Strategis Tahun 2025-2026.....	20
2.3.	Strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian.....	21
2.4.	Sasaran strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian.....	21
2.5.	Target RPD Tahun 2025-2026.....	25
2.6.	Perubahan perjanjian kinerja Tahun 2025.....	26
3.1.	Skala nilai peringkat kinerja.....	30
3.2.	Target Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.....	30
3.3.	Target sasaran dan indikator kinerja Dinas Pertanian dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.....	31
3.4.	Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja Tahun 2025.....	31
3.5.	Perbandingan realisasi komoditas unggulan Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	32
3.6.	Perbandingan realisasi Tahun 2025 terhadap target RPD Tahun 2025-2026.....	33
3.7.	Perbandingan realisasi Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat dan Nasional.....	34
3.8.	Capaian kegiatan di Dinas Pertanian.....	34

BAB I PENDAHULUAN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Mengacu dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pertanian melakukan laporan kinerja Instansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan anggaran selama Tahun 2025.

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam melakukan perumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penggunaan anggaran negara harus ada pertanggungjawabannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penyusunan laporannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Guna mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Bentuk upaya perencanaan Perangkat Daerah, capaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Laporan kinerja di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon disusun dengan maksud:

- a. Menyampaikan pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2025;
- b. Mengetahui tingkat capaian atau keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanian selama Tahun 2025;
- c. Bahan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pertanian di Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pertanian;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pertanian untuk meningkatkan kinerjanya;
- c. Mendorong Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pertanian di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Pohon Kinerja, *Cascading Kinerja*, *Crosscutting* Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Dokumen RPD Daerah Tahun 2025-2026 tidak memuat visi dan misi Kepala Daerah. Tujuan dan sasaran Pembangunan daerah pada RPD kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 diarahkan untuk mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005- 2025, yaitu **“Terbangunnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan produktif menuju masyarakat Kabupaten Cirebon yang Sejahtera”**.

Pernyataan Visi Pembangunan Kabupaten Cirebon, diatas memiliki makna:

- a. Beriman adalah kondisi kehidupan masyarakat yang mengamalkan ajaran agamanya dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Produktif adalah kondisi masyarakat Kabupaten Cirebon yang mandiri, berdaya guna dan berdaya saing tinggi.
- c. Sejahtera adalah kondisi terpenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan yang memberikan perasaan adil, aman dan makmur.

Indikasi terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025, ditandai dengan:

- a. Sumber Daya Manusia yang beriman ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah orang yang beribadah dan jumlah tempat peribadatan,

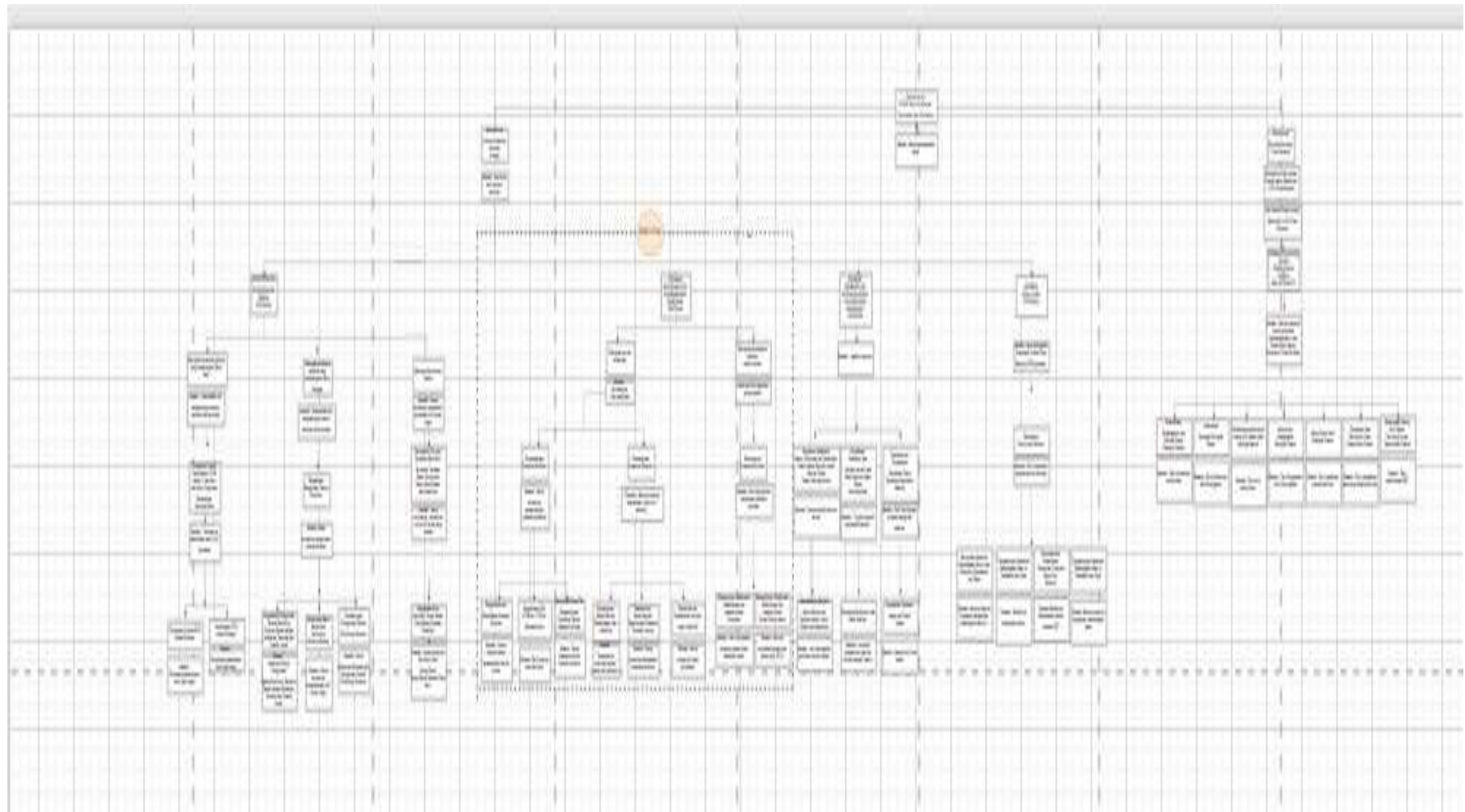
menguatnya kerukunan umat beragama dan antar umat beragama dan menurunnya penyakit masyarakat di Kabupaten Cirebon.

- b. Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon yang produktif ditunjukkan dengan berkurangnya pengangguran dan meningkatnya kualitas SDM.
- c. Masyarakat Kabupaten Cirebon yang sejahtera ditunjukkan dengan meningkatnya harmonisasi hubungan manusia dengan Allah manusia dan lingkungannya.

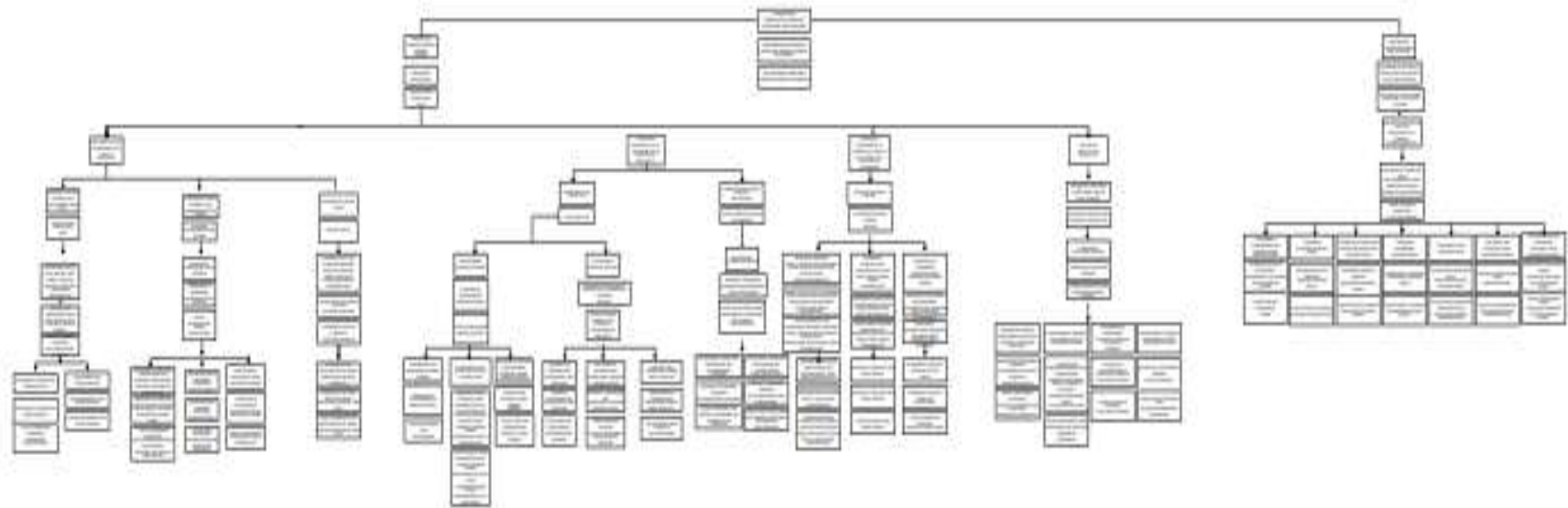
Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang akan dicapai melalui empat misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah mengembangkan potensi SDM yang telah dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk menciptakan SDM yang beriman, mandiri, berdaya guna dan berdaya saing tinggi.
 - b. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lestari adalah mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budi daya dan antara kawasan perkotaan dan perdesaan.
 - c. Terwujudnya perekonomian yang kuat adalah mengembangkan potensi usaha melalui pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemberian bantuan bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
4. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel adalah meningkatkan kinerja aparatur pemerintah untuk memenuhi fungsi pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon yang efektif.

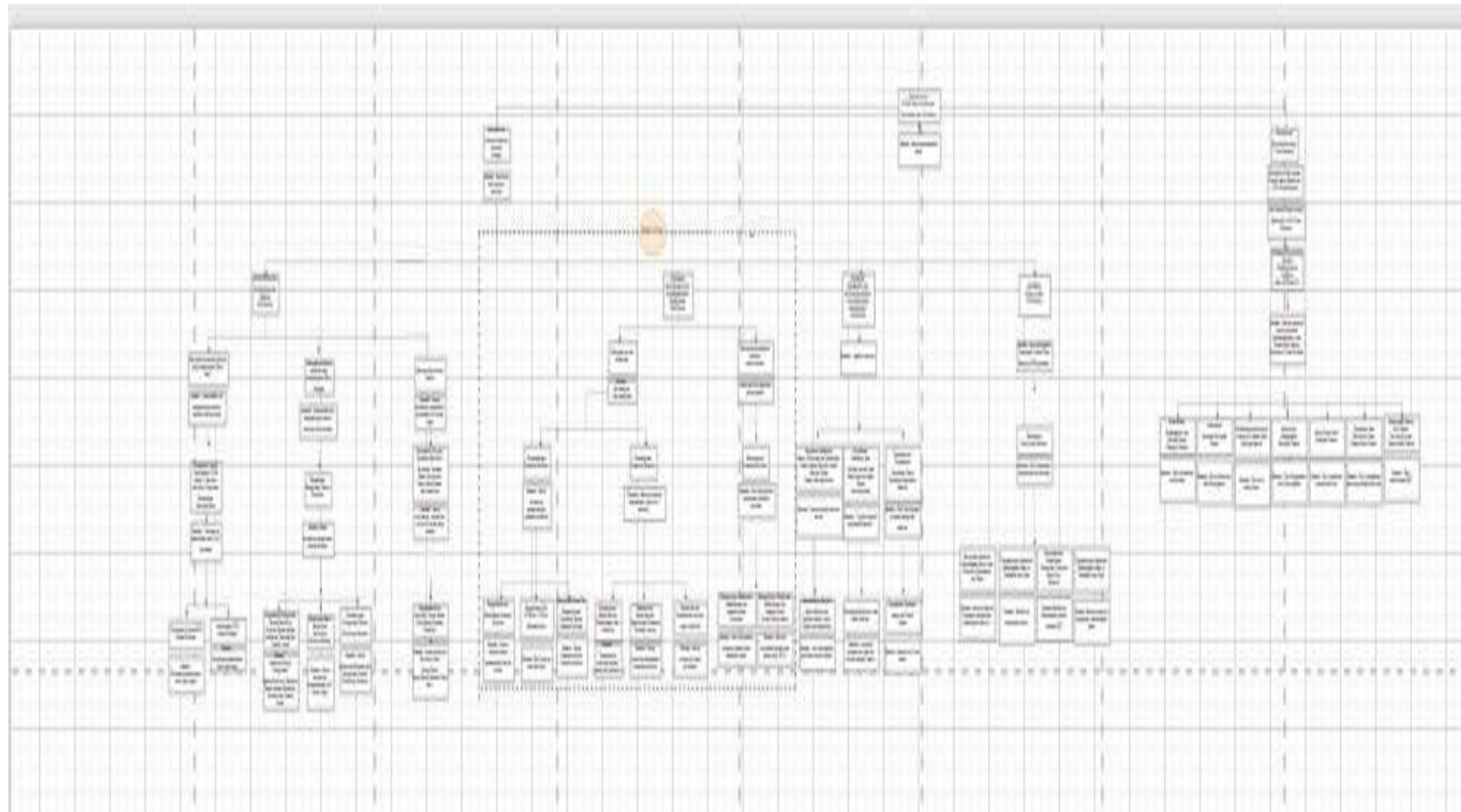
Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Gambar 1.1 Pohon kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon



Gambar 1.2. *Cascading kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon*



Gambar 1.3. Crosscutting Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

Dinas Pertanian terbentuk dan tersusun dari Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Susunan organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas, membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- d. Bidang Tanaman Pangan;
- e. Bidang Hortikultura dan Perkebunan;
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. Bidang Penyuluhan;
- h. UPTD, dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Struktur organisasi Dinas Pertanian sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 146 Tahun 2023 dapat digambarkan sebagaimana dalam gambar di bawah ini :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAH : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 146 TAHUN 2023
TANGGAL : 31 DESEMBER 2023
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON



Disusun oleh di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVALI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 146

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Gambar 1.4. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Merujuk pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 146 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian menyatakan bahwa Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Dinas Pertanian memiliki fungsi, antara lain:

- a. Perumusan kebijakan bidang pertanian;
- b. Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
- c. Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- e. Pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian;
- f. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian, dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian membagi jabatan kedalam dua komposisi yaitu:

Tabel 1.1. Peta jabatan

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
1. Kepala Dinas Pertanian 2. Sekretaris Dinas Pertanian a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian 4. Kepala Bidang Tanaman Pangan 5. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan 6. Kepala Bidang Penyuluhan 7. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 8. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tengah Tani a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tengah Tani 9. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Ciledug a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan Ciledug 10. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kaliwedi	1. Di bawah Sekretaris Dinas Pertanian a. Perencana Ahli (Pertma dan Muda) b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli (Muda) c. Arsiparis Ahli (Muda) d. Penata Layanan Operasional e. Penelaah Teknis Kebijakan f. Pengelola Layanan Operasional g. Pengolah Data dan Informasi h. Pengadministrasi Perkantoran 2. Di bawah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian a. Arsiparis Ahli Pertama b. Penata Layanan Operasional c. Pengelola Layanan Operasional

a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kaliwedi 11. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan 11. Kepala UPTD Pasar Hewan a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar Hewan	d. Pengolah Data dan Informasi e. Pengadministrasi Perkantoran f. Operator Layanan Operasional g. Pengelola Umum Operasional 3. Di bawah Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian a. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli (Pertama dan Muda) b. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli (Pertama dan Muda) c. Penata Layanan Operasional d. Penelaah Teknis Kebijakan e. Pengelola Layanan Operasional f. Operator Layanan Operasional 4. Di bawah Kepala Bidang Tanaman Pangan a. Pengawas Benih Tanaman Ahli (Pertama dan Muda) b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli (Pertama dan Muda) c. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli (Pertama dan Muda) d. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (Pemula) dan Ahli (Pertama dan Muda) e. Penelaah Teknis Kebijakan f. Penata Layanan Operasional g. Pengelola Layanan Operasional h. Operator Layanan Operasional 5. Di bawah Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli (Pertama dan Muda) b. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli (Pertama dan Muda) c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli (Pertama dan Muda) d. Penata Layanan Operasional e. Pengelola Layanan Operasional f. Pengolah Data dan Informasi g. Pengadministrasi Perkantoran h. Penyuluh Pertanian Ahli Muda 6. Di bawah Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan a. Medik Veteriner Ahli (Pertama dan Muda) b. Pengawas Mutu Pakan Ahli (Pertama dan Muda) c. Pengawas Bibit Ternak Ahli (Pertama dan Muda)
--	--

	d.Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli (Pertama dan Muda) e. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli (Pertama dan Muda) f. Paramedik Veteriner (Terampil, Mahir, Penyelia) g. Penelaah Teknis Kebijakan h. Penata Layanan Operasional i. Pengelola Layanan Operasional j. Pengolah Data dan Informasi k. Pengelola Umum Operasional 7. Di bawah Kepala Bidang Penyuluhan a. Penyuluh Pertanian Ahli (Pertama dan Muda) b. Penyuluh Pertanian (Pelaksana Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia) c. Penelaah Teknis Kebijakan d. Penata Layanan Operasional e. Pengelola Layanan Operasional f. Pengolah Data dan Informasi g. Operator Layanan Operasional 8. Di bawah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tengah Tani a. Medik Veteriner Ahli (Pertama dan Muda) d. Paramedik Veteriner (Terampil dan Mahir) i. Pengawas Mutu Pakan (Terampil, Mahir, Penyelia) dan Ahli (Pertama dan Muda) n. Pengawas Bibit Ternak (Terampil, Mahir, Penyelia) dan Ahli (Pertama dan Muda) 9. Di bawah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tengah Tani a. Penata Layanan Operasional b. Operator Layanan Operasional c. Pengelola Umum Operasional d. Pengadministrasi Perkantoran 10. Di bawah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Ciledug a. Medik Veteriner Ahli (Pertama dan Muda) b. Paramedik Veteriner (Terampil dan Mahir) c. Pengawas Mutu Pakan (Terampil, Mahir, Penyelia) dan Ahli (Pertama dan Muda) d. Pengawas Bibit Ternak (Terampil, Mahir, Penyelia) dan Ahli (Pertama dan Muda) 11. Di bawah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan Ciledug a. Penata Layanan Operasional
--	--

	b. Operator Layanan Operasional c. Pengadministrasi Perkantoran d. Pengelola Umum Operasional 12. Di bawah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kaliwedi a. Medik Veteriner Ahli (Pertama dan Muda) b. Paramedik Veteriner (Terampil dan Mahir) c. Pengawas Mutu Pakan (Terampil, Mahir, Penyelia) dan Ahli (Pertama dan Muda) d. Pengawas Bibit Ternak (Terampil, Mahir, Penyelia) dan Ahli (Pertama dan Muda) 13. Di bawah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kaliwedi a. Penata Layanan Operasional b. Operator Layanan Operasional c. Pengelola Umum Operasional 14. Di bawah Kepala UPTD Rumah Potong Hewan a. Medik Veteriner Ahli (Pertama dan Muda) d. Paramedik Veteriner (Terampil dan Mahir) 15. Di bawah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan a. Pengadministrasi Perkantoran b. Operator Layanan Operasional c. Pengelola Umum Operasional 16. Di bawah Kepala UPTD Pasar Hewan a. Medik Veteriner Ahli Pertama b. Paramedik Veteriner Terampil c. Pengawas Bibit Ternak (Terampil dan Mahir) 17. Di bawah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar Hewan a. Penelaah Teknis Kebijakan b. Penata Layanan Operasional c. Operator Layanan Operasional d. Pengelola Umum Operasional e. Pengadministrasi Perkantoran
--	---

1.3 Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting,

mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Tabel 1.2. Isu strategis, tujuan dan sasaran yang ada di Kabupaten Cirebon

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
1. perekonomian yang belum tumbuh secara optimal 2. Penyediaan dan Kemantapan Infrastruktur Wilayah 3. Komitmen Penyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi sektor unggulan
		Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Pengangguran dan Kemiskinan 5. Kualitas Sumber Daya manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat	Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas, berdaya saing dan kesetaraan Gender	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat
6. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal	Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, dan Kolaboratif	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan
		Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat
7. Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, dan Kondusifitas Daerah	Meningkatnya kondusifitas Wilayah
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pertanian telah melakukan solusi-solusi sebagai berikut:

- a. Integrasi proses hulu-hilir industri pengolahan khususnya sektor pertanian,
- b. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkelanjutan,
- c. Peningkatan fasilitas cakupan layanan penyediaan sarana dan prasarana pertanian berbasis kemandirian

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dinas Pertanian dalam menjalankan tugasnya didukung oleh ASN yang terdiri dari (PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu). Jumlah masing-masing yaitu PNS 167 orang, PPPK 160 orang, dan PPPK Paruh Waktu 25 orang (Data per 31 Desember 2025).

Tabel 1.3. Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi jabatan dan jenis kelamin Tahun 2025

No	Jabatan	Pegawai yang ada (Orang)		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Laki-Laki	Perempuan
1	Struktural:				
	Eselon I	0			
	Eselon II	1	S3	1	0
	Eselon III	6	S1, S2, S3	5	1
	Eselon IV	8	S1, S2	6	2
2	Pengawas Bibit Ternak	3	S1	2	1
3	Analisis Pasar Hasil Pertanian	3	S1	2	1
4	Pengawas Benih Tanaman	2	S1, S2	2	0
5	Pengawas Mutu Pakan	3	S1, S2	2	1
6	Penyuluh Pertanian	94	SMA, D3, S1, S2	55	39
7	Arsiparis	0	0	0	0
9	Medik Veteriner	8	S1, S2	2	6
9	Paramedik Veteriner	13	D3	6	7
10	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	0	0	0	0
11	Pengadministrasi Umum	5	SMA	5	0
12	Pengawas Lalu Lintas Hewan dan Wilayah Karantina Hewan	1	S1	1	0
13	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	0	0	0	0
14	Pengelola Akuntansi	1	SMA	0	1
15	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	1	D3	0	1
16	Pengelola Keuangan	3	SMA	1	2
17	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	0	0	0	0
18	Pengelola Rumah Potong Hewan	1	SMP	1	0
19	Pengelola Teknologi Perbenihan	1	D3	0	1
20	Pengolah Data	1	S1	1	0
21	Verifikator Keuangan	1	SMA	1	0
22	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	1	S1	1	0
23	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	1	S2	0	1
24	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	1	S2	1	0
25	Perencana Ahli Muda	1	S2	0	1
26	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	1	S1	1	0
27	Analisis Alat dan Mesin Pertanian	1	S1	0	1
28	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	3	S1	1	2
29	Pengawas Pupuk dan Pestisida	1	S1	0	1

30	Penelaah Teknis Kebijakan	1	S2	1	0
		167		98	69

Sedangkan latar belakang pendidikan untuk PNS, PPPK, dan tenaga honorer dari Sekolah Dasar (SD) hingga Strata Tiga (S3) yang tersaji pada tabel-tabel dibawah ini

Tabel 1.4. Distribusi jenjang pendidikan PNS di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

No	Golongan	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Juru Tk.I, I/d	SMP	1		1
2	Pembina Tk.I, IV/b	Dokter Hewan	1	1	2
	Pembina Tk.I, IV/b	S.1	3		3
	Pembina Tk.I, IV/b	S.3	1		1
3	Pembina Utama Muda, IV/c	S.1	2		2
	Pembina Utama Muda, IV/c	S.2		1	1
	Pembina Utama Muda, IV/c	S.3	1		1
4	Pembina, IV/a	S.1	5	2	7
	Pembina, IV/a	S.2	3	3	6
5	Penata Muda Tk.I, III/b	SMA	2	1	3
	Penata Muda Tk.I, III/b	D.4	1	1	2
	Penata Muda Tk.I, III/b	S.1	10	7	17
	Penata Muda Tk.I, III/b	S.2	1	6	7
6	Penata Muda, III/a	SMA	3	2	5
	Penata Muda, III/a	S.1	17	17	34
7	Penata Tk.I, III/d	S.1	18	6	24
	Penata Tk.I, III/d	S.2	3	3	6
8	Penata, III/c	SMA	0	1	1
	Penata, III/c	D.3	0	1	1
	Penata, III/c	S.1	6	1	7
	Penata, III/c	S.2	1	0	1
9	Pengatur Muda Tk.I, II/b	SMA	3	0	3
	Pengatur Muda Tk.I, II/b	SMP	1	0	1
10	Pengatur Muda, II/a	SMA	6	4	10
	Pengatur Muda, II/a	SMP	1	0	1
11	Pengatur Tk.I, II/d	SMA	1	0	1
	Pengatur Tk.I, II/d	D.3	3	5	8
12	Pengatur, II/c	D.3	4	7	11
Jumlah Total			98	69	167

Tabel 1.5. Distribusi jenjang pendidikan PPPK non penyuluh pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

No	Golongan	PENDIDIKAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	I	SEKOLAH DASAR	5		5
2	III	SMP	6		6
3	V	SMA	27	4	31
4	VII	D3	2		2
5	IX	SI	11	21	32
JUMLAH TOTAL			51	25	76

Tabel 1.6. Distribusi jenjang pendidikan PPPK penyuluh pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

No	Golongan	PENDIDIKAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	V	SMA	26	3	29
2	VI	D2	1		1
3	VII	D3	6		6
4	IX	SI	29	19	48
JUMLAH TOTAL			62	22	84

Tabel 1.7. Distribusi jenjang pendidikan PPPK Paruh Waktu Pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

No	Golongan	PENDIDIKAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Paruh Waktu, PW	SD	0	1	1
		SMP	2	0	2
		SMA	12	1	13
		SI	4	5	9
JUMLAH TOTAL			18	7	25

Berdasarkan golongan ASN Dinas Pertanian memiliki komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.8. Distrbusi PNS menurut pangkat/golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Juru Tk.I, I/d	1	0	1
2	Pembina Tk.I, IV/b	5	1	6
3	Pembina Utama Muda, IV/c	3	1	4
4	Pembina, IV/a	8	5	13
5	Penata Muda Tk.I, III/b	14	15	29
6	Penata Muda, III/a	20	19	39
7	Penata Tk.I, III/d	21	9	30
8	Penata, III/c	7	3	10
9	Pengatur Muda Tk.I, II/b	4	0	4
10	Pengatur Muda, II/a	7	4	11

11	Pengatur Tk.I, II/d	4	5	9
12	Pengatur, II/c	4	7	11
JUMLAH TOTAL		98	69	167

Tabel 1.9. Distrbusi PPPK non penyuluh menurut pangkat/golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	I	5		5
2	III	6		6
3	V	27	4	31
4	VII	2		2
5	IX	11	21	32
JUMLAH TOTAL		51	25	76

Tabel 1.10 Distrbusi PPPK penyuluh menurut pangkat/golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	V	26	3	29
2	VI	1		1
3	VII	6		6
4	IX	29	19	48
JUMLAH TOTAL		62	22	84

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon antara lain:

Tabel 1.11. Sarana dan Prasarana di Dinas Pertanian

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2025
	ASET TETAP	
1.3.01	Tanah	8.124.910.932
1.3.02	Peralatan dan Mesin	15.357.784.401,93
1.3.03	Gedung dan Bangunan	32.243.958.957,79
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.492.026.110
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	892.598.500
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	-23.655.659.609,93
Jumlah Aset Tetap		35.455.619.291,79
	ASET LAINNYA	
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	47.420.000
1.5.04	Aset Lain-Lain	3.261.942.873,29
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-47.420.000
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-1.355.573.936,36
Jumlah Aset Lainnya		1.906.368.936,93

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pertanian mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon. Anggaran tersebut terdiri dari : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki target Rp. 1.682.274.000, yang terealisasi sejumlah Rp. 1.984.505.964 yang artinya sudah melampaui target yang ditetapkan Daerah yaitu mencapai 117,97%. (2) Belanja Daerah memiliki pagu anggaran sejumlah Rp. 59.341.443.152 tetapi terealisasi hanya sebesar Rp. 53.450.981.589 yang artinya hanya 90,07% yang dapat terserap.

Tabel 1.12. Keuangan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2025

KODE REK	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.682.274.000	1.984.505.964
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.682.274.000	1.984.505.964
4.1.02.	Retribusi Daerah	1.682.274.000	1.984.505.964
5.	BELANJA DAERAH	59.341.443.152	53.450.981.589
5.1	BELANJA OPERASI	58.430.626.152	52.709.749.894
5.1.01	Belanja Pegawai	37.877.583.202	34.565.025.687
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.114.002.950	6.281.646.207
5.1.05	Belanja Hibah	13.439.040.000	11.863.078.000
5.2	BELANJA MODAL	910.817.000	741.231.695
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	741.358.000	572.822.295
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	169.459.000	168.409.400
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0
JUMLAH		61.023.717.152	55.435.487.553

Dinas Pertanian hanya mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon saja, tidak mengelola anggaran yang bersumber dari APBN ataupun APBD Provinsi Jawa Barat.

1.5 Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2024

Tindak lanjut dari hasil evaluasi laporan kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 yaitu:

Tabel 1.13. Tindak lanjut laporan kinerja instansi Pemerintah Tahun 2024

No	Rekomendasi Temuan	Tindaklanjut OPD
A.	PERENCANAAN KINERJA	
1	-	
B.	PENGUKURAN KINERJA	
2	Laporan Kinerja telah disusun, namun belum dilengkapi dengan SOP yang menjelaskan mekanisme penyusunan Laporan AKIP	Telah membuat dan melengkapi dengan SOP yang menjelaskan mekanisme penyusunan Laporan AKIP
C.	PELAPORAN KINERJA	
3	-	
D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014	Telah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilengkapi dengan pernyataan pimpinan bahwa telah direviu secara internal, formulir checklist reviu dan SK Tim Reviu Internal

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 adalah dokumen pembangunan Kabupaten Cirebon untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 ini diatur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2026.

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2023, disebutkan bahwa penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten/Kota dan atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun kelima dan isu strategis aktual.

Dokumen RPD Daerah Tahun 2025-2026 tidak memuat visi dan misi Kepala Daerah, dengan demikian penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025, serta isu strategis aktual. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan hasil perumusan target capaian kinerja pembangunan pada level tertinggi yang bersifat strategis, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan daerah menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan daerah, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang ditargetkan dapat tercapai dalam jangka waktu 2 (tiga) tahun ke depan. Selanjutnya, tujuan pembangunan daerah dijabarkan ke dalam sasaran pembangunan daerah yang terukur, spesifik, rasional, dan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan. Sasaran pembangunan daerah menunjukkan fokus dari tujuan Pembangunan daerah dan menggambarkan kondisi pencapaian hasil (outcome) kinerja perangkat daerah.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Dokumen RPD Daerah Tahun 2025-2026 tidak memuat visi dan misi Kepala Daerah, dengan demikian penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025, serta isu strategis aktual. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan hasil perumusan target capaian kinerja pembangunan pada level tertinggi yang bersifat strategis, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan pembangunan daerah menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan daerah, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang ditargetkan dapat tercapai dalam jangka waktu 2 (tiga) tahun ke depan. Selanjutnya, tujuan pembangunan daerah dijabarkan ke dalam sasaran pembangunan daerah yang terukur, spesifik, rasional, dan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan. Sasaran pembangunan daerah menunjukkan fokus dari tujuan Pembangunan daerah dan menggambarkan kondisi pencapaian hasil (outcome) kinerja perangkat daerah.

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Dinas Pertanian, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

Tabel 2.1. Sasaran dan indikator kinerja sasaran Dinas Pertanian

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatkan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
1.1.	Meningkatnya produksi komoditas pertanian unggulan Dst	Produksi Gabah Kering Panen (GKP)
		Produksi mangga
		Populasi domba
2.	Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pemerintah Daerah
2.1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian

Tabel 2.2. Target sasaran di Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	Target 2026
RPD 2025-2026					
1	Meningkatnya produksi komoditas pertanian unggulan	Meningkatnya produksi komoditas padi	ton	708.140	709.557
		Meningkatnya produksi mangga	Ton	40.780	40.943
		Meningkatnya populasi domba	ekor	311.418	312.196
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian	poin	72,00	73,00

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Kabupaten Cirebon pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada (Tabel 2.3.)

Tabel 2.3. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian

No	Strategi	No	Arah Kebijakan
1	Peningkatan kualitas dan produktivitas pangan lokal	1.1	Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat
		1.2	Peningkatan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau
		1.3	Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan harapan (PPH)

2.3 Struktur Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Pertanian melaksanakan 2 urusan Pemerintahan yaitu : (1) Urusan Pertanian yang memiliki 4 (enam) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan; dan (2) Non urusan Pertanian memiliki 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan.

Tabel 2.4. Sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya produksi komoditas pertanian unggulan	1. Urusan Pertanian		
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
				Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
				Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutuan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
		Program Penyuluh Pertanian	Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
				Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
		2. Non Urusan Pertanian		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
				Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
				Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
				Evaluasi kinerja perangkat daerah
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/s emesteran SKPD
			Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Pengamanan barang milik daerah SKPD

			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
				Penyediaan bahan logistik kantor
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
				Penyediaan bahan/material
				Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
				Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Tabel 2.5. Target RPD Tahun 2025-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	Target 2026
RPD 2025-2026					
1	Meningkatnya produksi komoditas pertanian unggulan	Meningkatnya produksi komoditas padi	ton	708.140	709.557
		Meningkatnya produksi mangga	Ton	40.780	40.943
		Meningkatnya populasi domba	ekor	311.418	312.196
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian	poin	72,00	73,00

Pada bulan September 2025, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon melaksanakan perubahan perjanjian kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan dokumen pelaksanaan perubahan perjanjian kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6. Perubahan perjanjian kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	
RPD 2025-2026				Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya produksi komoditas pertanian unggulan	Meningkatnya produksi komoditas padi	ton	708.140	685.003
		Meningkatnya produksi mangga	Ton	40.780	40.780
		Meningkatnya populasi domba	ekor	311.418	311.418
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian	poin	72,00	72,00

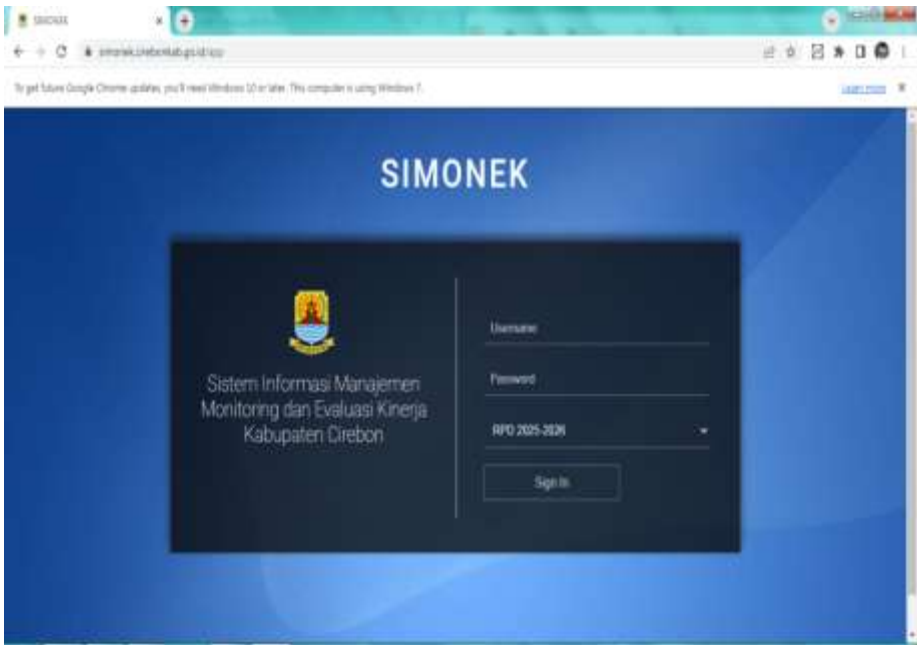
Perubahan perjanjian kinerja Dinas Pertanian Tahun 2025 meliputi :
(1) perubahan target sasaran produksi komoditas padi yang semula 708.140 ton berubah menjadi 685.003 ton. (2) perubahan anggaran yang semula sebesar Rp 57.753.323.452 berubah menjadi Rp 59.341.443.152.

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

- a. e-SAKIP Reviu adalah sistem yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online.



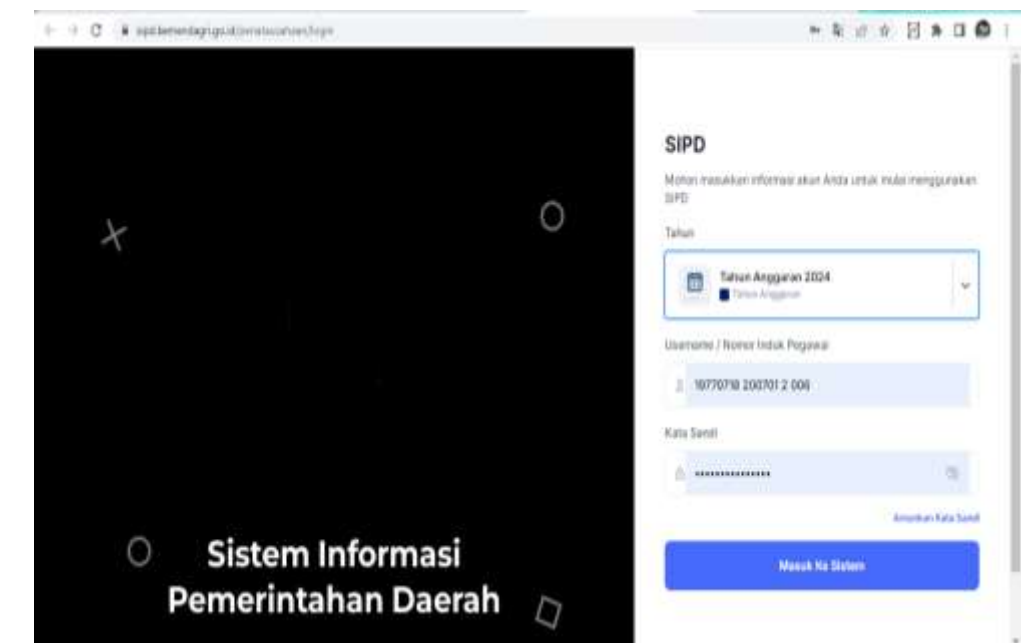
- b. Aplikasi beralamatkan <https://simonek.cirebonkab.go.id/> merupakan aplikasi yang dimiliki Kabupaten Cirebon yang digunakan sebagai sarana pelaporan kinerja setiap SKPD tiap bulan untuk mengetahui sudah sejauh mana dalam melakukan program/kegiatan dan penggunaan anggaran.



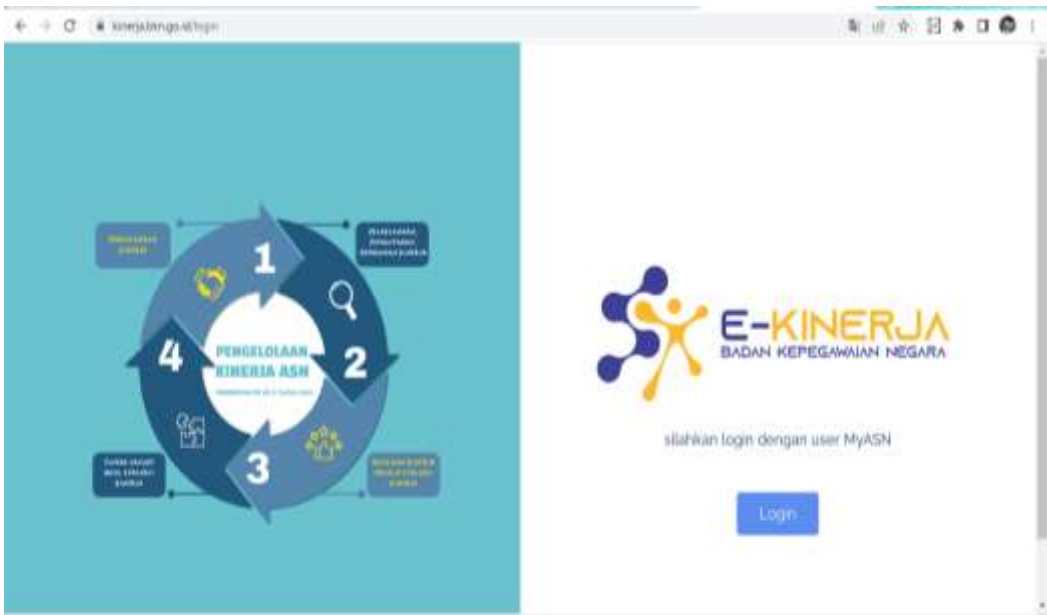
- c. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga memiliki aplikasi e-Sakip yang merupakan suatu sistem untuk mengukur akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon.



- d. SIPD Kemendagri adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). SIPD ini merupakan aplikasi berbasis elektronik (SPBE) yang mengintegrasikan data pemerintahan daerah. Alamatnya yaitu (<https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/login>)



- e. E-Kinerja adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Alamat websitenya adalah (<https://kinerja.bkn.go.id/login>).



- f. E-perencanaan atau e-planning adalah sistem informasi perencanaan yang menggunakan teknologi untuk membantu menyusun rencana pembangunan daerah. E-planning dapat digunakan oleh berbagai instansi pemerintah. Seperti Bappeda, SKPD, DPRD, dan kepala daerah. Alamat websitenya (<https://perencanaan.cirebonkab.go.id/>)



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan pengukuran capaian kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dalam pengukuran capaian kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran di Dinas Pertanian.

Tabel 3.1. Skala nilai peringkat kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Pertanian Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.2. Target Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	Target 2026
RPD 2025-2026					
1	Meningkatnya produksi komoditas pertanian unggulan	Meningkatnya produksi komoditas padi	ton	708.140	709.557
		Meningkatnya produksi mangga	Ton	40.780	40.943
		Meningkatnya populasi domba	ekor	311.418	312.196
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian	poin	72,00	73,00

Pada pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 terdapat perubahan target kinerja. Pada saat penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 asumsi yang digunakan adalah asumsi optimis dimana semua kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses produksi tercukupi sehingga target produksi seperti tertuang pada Tabel 3.2. namun apabila sarana dan prasarana produksi sesuai dengan kondisi yang ada maka target produksi pada rencana kerja (Renja) setiap tahunnya disesuaikan dengan potensi yang ada seperti pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Target sasaran dan indikator kinerja Dinas Pertanian dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	
RPD 2025-2026				Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya produksi komoditas pertanian unggulan	Meningkatnya produksi komoditas padi	ton	708.140	685.003
		Meningkatnya produksi mangga	Ton	40.780	40.780
		Meningkatnya populasi domba	ekor	311.418	311.418
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian	poin	72,00	72,00

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel. 3.4. Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase Capaian
1	Meningkatnya produksi komoditas pertanian unggulan	Meningkatnya produksi komoditas padi	685.003 ton	695.991 ton	101,6%
		Meningkatnya produksi mangga	40.780 ton	37.923 ton	92,99%
		Meningkatnya populasi domba	311.418 ekor	310.500 ekor	99,71%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian	72,00	73,90	102,64

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

- a) Sasaran 1 : Meningkatnya produksi komoditas pertanian unggulan
- Dari tabel diatas menunjukkan pada komoditas padi memiliki capaian 101,6% melebihi target yang telah ditetapkan hal ini **didukung** karena adanya penambahan luas tanam dan luas panen, serta di tahun 2025 ini memiliki iklim kemarau basah sehingga padi mendapatkan air secara optimal sepanjang tahun. Sedangkan untuk komoditas mangga capaian hanya 92,99%, **faktor penghambatnya** yaitu cuaca extrem di tahun ini sehingga menimbulkan kerontokan pada bunga-bunga mangga, yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi pada buah mangga di Tahun 2025. Pada populasi domba capaian hanya 99,71% **disebabkan** rendahnya pemahaman peternak mengenai pemanfaatan inseminasi buatan (IB) dalam meningkatkan mutu genetik dan kualitas keturunan menyebabkan masih adanya resistensi terhadap pelaksanaan program IB.
- b) Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian
- Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian target RPD 72 poin, realisasi 73,90 poin artinya memiliki capaian sebesar 102,64%.

3.2 Capaian Kinerja Lainnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi komoditas unggulan Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Kinerja Sasaran Tahun 2024	Realisasi	Kinerja Sasaran Tahun 2025	Realisasi
1.	Beras (ton)	359.473	Padi (GKP) (ton)	695.991 ton
2.	Bawang Merah (ton)	32.095	Mangga (ton)	37.923 ton
3.	Cabai Besar (ton)	4.153,2	Populasi Domba (ekor)	310.500 ekor
4.	Mangga (ton)	44.776	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian	73,90 poin
5.	Gula (ton)	21.305,68		
6.	Daging Domba (ton)	1.930,20		
7.	Daging Unggas Lokal (ton)	1.888,70		

Capaian komoditas unggulan di Tahun 2025 didukung dari program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, yaitu sebagai tolok ukurnya berupa persentase pengembangan benih padi yang mencapai 117.95%, persentase pengembangan benih mangga mencapai 100%, dan persentase pengembangan bibit domba mencapai 112,50%.

Hasil data Tahun 2024 dan 2025 menunjukkan hasil :

1. Pada komoditas mangga terjadi penurunan produksi yang sebelumnya di Tahun 2024 (44.776 ton) dan di Tahun 2025 hanya mencapai (37.923 ton) Produksi ini menurun **dipengaruhi** adanya cuaca extrem di Tahun 2025, sehingga menyebabkan banyak bunga-bunga mangga mengalami kerontokan dan menyebabkan produksi tidak optimal. **Rencana tindak lanjut** di Tahun 2026 akan diberikan saprodi dikegiatan Upland.
2. Untuk komoditas lainnya tidak bisa dibandingkan antara Tahun 2024 dan 2025 karena berbeda sasaran komoditas dan parameter pengukurannya.

Tabel 3.6.Perbandingan realisasi Tahun 2025 terhadap target RPD Tahun 2025-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPD 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase Capaian
1	Meningkatnya produksi komoditas pertanian unggulan	Meningkatnya produksi komoditas padi	708.140 ton	695.991 ton	98,28%
		Meningkatnya produksi mangga	40.780 ton	37.923 ton	92,99%
		Meningkatnya populasi domba	311.418 ekor	310.500 ekor	99,71%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian	72,00	73,90	102,64

Pencapaian dari target sasaran produksi dan populasi yang telah ditetapkan di RPD Tahun 2025-2026, Dinas Pertanian dapat merealisasikannya rata-rata diatas 90%. Sedangkan untuk Nilai LKIP Dinas Pertanian dapat mencapai 102,64%. Sehingga capaian kinerja ini dikatakan tercapai, dan memiliki penilaian kinerja capaian sasaran strategis yang **“Tinggi”**.

Dinas Pertanian dalam memenuhi target sasaran yang telah ditetapkan RPD Tahun 2025-2026 memiliki faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat. **Faktor pendukung** keberhasilan diantaranya yaitu : (1) Ketersediaan anggaran; dan (2) Ketersediaan SDM yang cukup. Sementara **Faktor penghambatnya** di Tahun 2025 terjadi kemarau basah sehingga

pada komoditas mangga tidak dapat menghasilkan produksi yang optimal karena bunga-bunganya pada rontok menyebabkan penurunan produksi.

Tabel 3.7.Perbandingan realisasi Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat dan Nasional

No	Komoditas	Kabupaten Cirebon	Jawa Barat	Nasional
1	Padi (GKP) (ton)	695.991	15.221.368,5 ^{*(2025)}	73.484.571,3 ^{*(2025)}
2	Mangga (ton)	37.923	468.467,1 ⁽²⁰²⁴⁾	3.301.739,9 ⁽²⁰²⁴⁾
3	Domba (ekor)	310.500	5.561.197 ^{*(2025)}	9.148.928 ^{*(2025)}

Ket : (*) angka sementara
Sumber : Badan Pusat Statistik

Komoditas unggulan di Kabupaten Cirebon yaitu :

- a. Komoditas Padi (GKP), Kabupaten Cirebon memiliki data produksi di Tahun 2025 sebesar 695.991 ton. Dari Produksi Propinsi Jawa Barat (15.221.368,5 ton), dan produksi Nasional sebesar (73.484.571,3 ton). Capaian produksi beras Kabupaten Cirebon di Propinsi Jawa Barat sebesar 4,57%, sedangkan capaian Kabupaten Cirebon terhadap Nasional hanya sebesar 0,95%.
- b. Komoditas Mangga di Kabupaten Cirebon memiliki hasil produksi sebesar 37.923 ton, sedangkan di Propinsi Jawa Barat produksinya mencapai 468.467,1 ton, dan produksi Nasional mencapai 3.301.739,9 ton. Capaian produksi mangga Kabupaten Cirebon di Propinsi Jawa Barat sebesar 8,1%, sedangkan capaian Kabupaten Cirebon terhadap Nasional hanya sebesar 1,14%.
- c. Populasi Domba mencapai 310.500 ekor, di Propinsi Jawa Barat produksi mencapai 5.561.197 ekor, dan produksi Nasional mencapai 9.148.928 ekor. Capaian populasi domba Kabupaten Cirebon di Propinsi Jawa Barat sebesar 5,58%, sedangkan capaian populasi domba Kabupaten Cirebon terhadap Nasional hanya sebesar 3,39%.

3.3 Efisiensi Anggaran

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugasnya ada 2 urusan, yaitu:

Tabel 3.8. Capaian kegiatan di Dinas Pertanian

URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN	OUTCOME/ OUTPUT/ SUBOUTPUT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.588.288.252	37.008.290.728	3.579.997.524	91,18	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD 86,33 poin
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	419.224.100	395.097.008	24.127.092	94,24	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.118.400	3.118.400	0	100	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.357.500	2.357.500	0	100	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.067.400	1.067.400	0	100	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.745.800	1.745.800	0	100	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.313.400	4.313.400	0	100	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.695.700	21.646.070	49.630	99,77	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 laporan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.877.583.202	34.565.025.687	3.312.557.515	91,25	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 329 orang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.770.300	3.770.300	0	100	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.753.300	4.715.700	37.600	99,21	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD 18 laporan
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	29.960.700	29.907.290	53.410	99,82	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12 dokumen
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependudukan	27.903.200	27.796.380	106.820	99,62	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kependudukan 12 dokumen
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.242.400	4.242.400	0	100	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 50 paket

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.311.000	333.126.560	3.184.440	99,05	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.115.000	60.115.000	0	100	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.099.000	30.007.800	91.200	99,70	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.070.000	19.641.000	3.429.000	85,14	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 dokumen
Penyediaan Bahan/Material	81.117.100	80.187.200	929.900	98,85	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 50 paket
Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.100.000	10.100.000	0	100	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.289.600	41.289.600	0	100	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 laporan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.454.200	3.454.200	0	100	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 12 dokumen
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	499.968.450	363.711.123	136.257.327	72,75	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	372.105.000	369.675.000	2.430.000	99,35	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 laporan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.796.000	50.688.000	45.108.000	52,91	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 21 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.940.000	24.940.000	0	100	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	608.187.500	556.551.910	51.635.590	91,51	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 53 unit
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	15.568.147.000	13.594.864.591	1.973.282.409	87,32	➤ Persentase pengembangan benih padi 2,30% ➤ Persentase pengembangan benih mangga 0,90% ➤ Persentase pengembangan bibit domba 0,09%

Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	13.439.040.000	11.863.078.000	1.575.962.000	88,27	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 12 laporan
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	293.441.500	217.720.690	75.720.810	74,20	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 12 laporan
Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	798.840.000	606,681.930	#VALUE!	75,95	Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang yang diperbanyak 8000 batang
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	205.482.500	193.079.940	12.402.560	93,96	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 12 dokumen
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	202.071.500	182.322.680	19.748.820	90,23	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 12 dokumen
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	629.271.500	531.981.351	97.290.149	84,54	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 12 laporan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.708.996.100	1.456.899.897	252.096.203	85,29	➤ Luas tanaman padi 92.489 Ha ➤ Jumlah sertifikat pelayanan yang diperoleh 1 jenis
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	57.551.700	49.896.422	7.655.278	86,70	Jumlah lahan pertanian yang termanfaatkan 57.385 Ha
Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	42.330.500	37.281.770	5.048.730	88,07	Jumlah Action Plan, Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian 12 dokumen
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	321.420.700	304.066.830	17.353.870	94,60	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 unit
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	361.694.000	358.746.010	2.947.990	99,18	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 unit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	346.841.100	323.374.370	23.466.730	93,23	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 7 unit
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	579.158.100	383.534.495	195.623.605	66,22	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 2 unit
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	266.646.500	218.294.523	48.351.977	81,97	Persentase penurunan kejadian zoonosis 0%
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	206.360.900	164.193.763	42.167.137	79,57	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular

					dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 12 laporan
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	60.285.600	54.100.760	6.184.840	89,74	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 12 laporan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.209.365.300	1.172.631.850	36.733.450	96,96	Persentase kenaikan kelas kemampuan kelompok tani 9,44 %
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	108.570.000	103.467.150	5.102.850	95,30	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 40 unit
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	243.515.300	243.424.700	90.600	99,96	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 326 unit
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	857.280.000	825.740.000	31.540.000	96,32	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 188 orang
Total Belanja	59.341.443.152	53.450.981.589	5.890.461.563	90,07	

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Pertanian memiliki Pagu anggaran di Tahun 2025 sebesar Rp 59.341.443.152, dan terealisasi Rp 53.450.981.589 atau 90,07% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

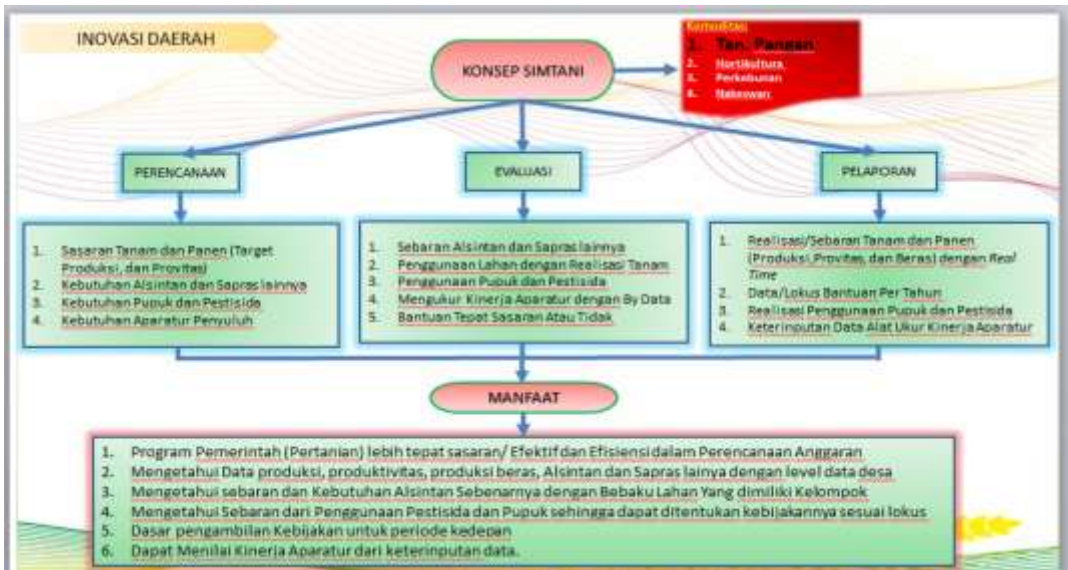
Terdapat efisiensi Rp 5.890.461.563 yang bersumber dari :

- Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Rp 3.579.997.524)
- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (Rp 1.973.282.409)
- Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (Rp 252.096.203)
- Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat vetriner (Rp 48.351.977)
- Program penyuluhan pertanian (Rp 36.733.450)

3.4 Inovasi

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon memiliki inovasi yaitu :

- 1. Memiliki sistem yang diberi nama SIMTANI (Sistem Informasi Manajemen Pertanian). SIMTANI sebagai sarana pengelolaan data pertanian dirancang dalam bentuk *web app* yang terintegrasi dengan teknologi geospasial. Alamat websitenya (<http://distan.cirebonkab.go.id/app/>)



Gambar 3.1. Konsep SIMTANI



Gambar 3.2. Aplikasi SIMTANI

2. ASN Dinas Pertanian juara ke-3 sebagai Inseminator terbaik dalam pelaksanaan kegiatan optimalisasi reproduksi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.



3. Dinas Pertanian (khususnya BPP Gegesik) mendapatkan penghargaan dari Provinsi Jawa Barat dalam kategori Balai Penyuluhan Pertanian berprestasi sebagai juara harapan II.



4. Dinas Pertanian mendapatkan juara harapan I pada Gapoktan Bawang Merah di kategori kelompok tani (Gapoktan) berprestasi penghargaan insan pertanian berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat.



3.5 Lintas Sektor

Dinas Pertanian dalam menjalankan tugasnya bekerjasama dengan :

- Badan Pusat Statistik dalam mengumpulkan data-data statistik pertanian.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sharing data untuk memenuhi ketersediaan pangan khususnya di Kabupaten Cirebon,
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kerjasama dalam penyaluran Bantuan Keuangan Dana Khusus,
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kerjasama dalam penentuan pembagian lahan pertanian yang di lindungi.
- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dalam mengumpulkan data-data statistik pertanian
- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dalam mengumpulkan data statistik peternakan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dinas Pertanian dalam menjalankan urusannya memiliki dua urusan yaitu : (1) Urusan Pertanian yang memiliki 4 (enam) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan; dan (2) Non urusan Pertanian memiliki 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan.

Dinas Pertanian memiliki realisasi capaian sasaran rata-rata diatas 90%. Sedangkan untuk Nilai LKIP Dinas Pertanian dapat mencapai 102,64%. Sehingga capaian kinerja ini dikatakan tercapai, dan memiliki penilaian kinerja capaian sasaran strategis yang **“Tinggi”**. Capaian ini dapat tercapai karena adanya dukungan anggaran dan Sumber Daya Manusia.

Dinas Pertanian pada Tahun 2025 memiliki pagu anggaran sebesar Rp 59.341.443.152, dan terealisasi Rp 53.450.981.589 atau 90,07% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah perbaikan kinerja untuk peningkatan produksi komoditas unggulan, antara lain (1) peningkatan Indeks pertanaman (IP); (2) peningkatan luas pertanaman; (3) melakukan percepatan tanam; (4) pemberian saprodi pada kegiatan *upland*; (5) melakukan sosialisasi mengenai Inseminasi Buatan (IB) ke peternak supaya lebih banyak didapatkan genetik yang bermutu dan berkualitas.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT
Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643
[Website : inspektorat.cirebonkab.go.id](http://inspektorat.cirebonkab.go.id) email inspektorat@cirebonkab.go.id
SUMBER

CATATAN HASIL EVALUASI
ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2024
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.11.1 / 355 / Sekrt tanggal 21 Februari 2025 untuk melaksanakan Evaluasi AKIP Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan ini kami sampaikan Catatan Hasil Evaluasi sebagai berikut :

- 1. Waktu Pelaksanaan Evaluasi:
Evaluasi dilaksanakan mulai dari tanggal 03 s/d 17 Maret 2025.
- 2. Penilaian
Dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon diperoleh hasil, sebagai berikut :
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian
Nilai Angka Evaluasi AKIP : 73,90
Kategori Predikat : BB (Sangat Baik)
Dengan Catatan sebagai berikut :
a. Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 pada Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
A.	PERENCANAAN KINERJA	30	24,6
1.	Dokumen rencana aksi untuk menggambarkan aktivitas yang dilaksanakan guna mendukung kinerja belum dibuat dokumen rencana aksi perubahan atas penyesuaian dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.		
B.	PENGUKURAN KINERJA	30	21,6
2.	Dokumen rencana aksi untuk menggambarkan aktivitas yang dilaksanakan guna mendukung kinerja belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas rencana aksi tersebut.		
C.	PELAPORAN KINERJA	15	10,2
3.	Pada BAB III dokumen LKJIP Dinas Pertanian belum terdapat analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan kinerja perangkat daerah.		

D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25	17,5
4.	Evaluasi AKIP internal belum didukung SDM yang memadai.		
	JUMLAH	100	73,9

b. Tindakanjnt Hasil Evaluasi Sebelumnya

NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
1	Rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2023 oleh APIP Inspektorat Kabupaten Cirebon sebanyak 2 rekomendasi	Rekomendasi seluruhnya telah ditindaklanjuti

3. Rekomendasi

a. Dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 sebagaimana tercantum di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, agar :

NO.	KOMPONEN
A.	PERENCANAAN KINERJA
1.	Membuat dokumen rencana aksi perubahan Tahun 2024.
B.	PENGUKURAN KINERJA
2.	Melakukan dan membuat laporan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi Tahun 2024.
C.	PELAPORAN KINERJA
3.	Memperbaiki dokumen LKjIP Dinas Pertanian dengan menambahkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada BAB III.
D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
4.	Evaluasi AKIP internal didukung SDM yang memadai.

b. Tindakanjnt Hasil Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2023 oleh APIP Inspektorat Kabupaten Cirebon sebanyak 2 rekomendasi telah seluruhnya ditindaklanjuti.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon telah menyelesaikan tindakanjnt atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2024.

4. Komenta Pejabat yang Dievaluasi :

Demikian Catatan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, kiranya menjadi maklum dan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dimaksud.





Gambar 1. Monitoring JUT



Gambar 2. Vaksinasi PMK



Gambar 3. Sosialisasi pelaksanaan IB Domba



Gambar 4. Inseminasi Buatan pada Sapi



Gambar 5. Monitoring Alsintan



Gambar 6. Verifikasi CPCL APBD Provinsi Jawa Barat TA 2025



Gambar 7. Monitoring kelembagaan petani di BPP



Gambar 8. Kursus tani



Gambar 9. Pelatihan penyuluhan pertanian